

# IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kevin Tumbur Situmorang

NPP. 30.1004

Asdaf Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan  
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Email: [kevin.situmorang.2014@gmail.com](mailto:kevin.situmorang.2014@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Eko Budi Lestari., SE, MM

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP):** *The Regional Government Information System (SIPD) is an integrated application created by the Directorate General of Regional Finance of the Ministry of Home Affairs. SIPD provides benefits in regional financial management. However, in the operation of SIPD, there are still many problems encountered. This resulted in the benefits of SIPD not being fully realized.*

**Purpose:** *The purpose of preparing this Final Report is to find out how SIPD is implemented in regional financial management in the City of Banjarmasin, the inhibiting factors in the use of SIPD, as well as the efforts made by the Regional Government of Banjarmasin City.*

**Methods:** *This research is a qualitative research with descriptive research methods and through an inductive approach. Data collection techniques are by using observation, interviews, and documentation. The data analysis steps used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions.*

**Results/Findings:** *Based on the results of research conducted by the authors, the use of SIPD in regional financial management is not optimal. This is caused by employees who are still not proficient in using SIPD, supporting facilities are not maximized, the network in operating SIPKD sometimes has errors, and information has not been updated on the website. The Municipal Government of Banjarmasin is making an effort to optimize SIPD, namely by continuing to conduct training for employees regarding the operation of SIPD and adding more employees at Bakeuda, Banjarmasin City, as well as repairing and updating facilities and infrastructure.*

**Conclusion:** *Suggestions from the author for the Banjarmasin City government are to often provide periodic training on SIPD, install antivirus to maintain data security.*

**Keywords:** *SIPD, SIPD Benefits, SIPD Effectiveness, Regional Financial Management*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan aplikasi terpadu yang diciptakan oleh Direktorat Jendral Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. SIPD memberikan manfaat dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun dalam pengoperasian SIPD, masih banyak masalah yang dihadapi. Hal ini mengakibatkan manfaat SIPD belum terwujud sepenuhnya.*

**Tujuan:** *Penyusunan Laporan Akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Banjarmasin, faktor penghambat dalam penggunaan SIPD, serta upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin.*

**Metode:** *Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif dan melalui pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara, serta*

dokumentasi. Adapun langkah analisa data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan penggunaan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh pegawai yang masih belum mahir dalam penggunaan SIPD, fasilitas pendukung belum maksimal, jaringan dalam pengoperasian SIPKD terkadang eror, dan informasi belum terupdate di website. Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan suatu upaya untuk mengoptimalkan SIPD yaitu terus melakukan pelatihan bagi pegawai mengenai pengoperasian SIPD dan Menambah pegawai di Bakeuda Kota Banjarmasin, serta memperbaiki dan memperbaharui sarana dan prasana. **Kesimpulan:** Saran dari penulis untuk pemerintah Kota Banjarmasin yaitu sering memberikan pelatihan berkala mengenai SIPD, memasang antivirus untuk menjaga keamanan data.

**Kata Kunci:** SIPD, Manfaat SIPD, Efektivitas SIPD, Pengelolaan Keuangan Daerah

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan sistem pengelolaan daerah. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sangat relevan untuk diterapkan di negara Indonesia saat ini karena memudahkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem pengelolaan keuangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki manfaat yang jelas dari pengeluaran atau belanja yang dikeluarkannya. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk menciptakan mekanisme pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien agar terciptanya sistem pemerintahan yang baik. Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sudah sangat pesat di dunia saat ini, maka pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi ini juga akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dengan segala kemudahannya. Dalam membantu mewujudkan hal ini pemerintah mengeluarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan sebuah aplikasi yang dirancang untuk mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data tentang informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya, dimana satu sama lainnya saling berhubungan dalam rangka pengelolaan pembangunan daerah. Sistem Informasi Pemerintah Daerah akan menjadi database yang dimiliki oleh daerah untuk menyediakan informasi terkait potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Sistem Informasi ini dibuat untuk menghasilkan sebuah layanan informasi pemerintah daerah yang berbasis elektronik yang saling terintegrasi secara nasional agar mempermudah pengawasan kinerja pemerintah daerah oleh pemerintah pusat dan mampu mengsinergikan penyelenggaraan pembangunan daerah yang berkualitas dan inovatif. Pemerintah provinsi, kabupaten atau kota diharapkan untuk dapat menerapkan Sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD) ini dalam pengelolaan keuangan daerah di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hal ini diharapkan untuk mewujudkan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas hasil Laporan keuangan yang baik dan akuntabel. Suatu Laporan keuangan haruslah menyajikan informasi secara wajar, dan menyajikan secara penuh terkait dengan kegiatan yang

dilakukan oleh pemerintah daerah, dan menampilkan kesesuaian dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Pemerintah daerah melalui Badan Keuangan Daerah selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin harus memberikan perhatian lebih dalam pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ini karena mengingat pentingnya peranan Sistem Informasi Manajemen dalam pengelolaan keuangan yaitu memudahkan penginputan data, tepat dalam perhitungan, kecepatan proses transaksi keuangan, efisien dalam waktu dan biaya, jaminan transparansi sehingga anggaran bisa dikendalikan, serta kemudahan interaksi antar pegawai yang berkepentingan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas keluaran (output) yang dihasilkan dari sistem ini baik dalam bentuk laporan keuangan maupun dokumen-dokumen penting lainnya. Dari beberapa kekurangan yang didapatkan dalam sistem tersebut bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah tersebut masih belum terlaksana sepenuhnya sesuai dengan harapan serta tujuan dari Peraturan Pemerintah sehingga harapan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah belum terpenuhi secara maksimal. Itulah sebabnya dalam kendala yang dihadapi tentunya terdapat faktor-faktor yang didapatkan dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kota Banjarmasin ini. Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang permasalahan tersebut dengan judul “ Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Terhadap Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan”

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

penelitian Oliver David Apouw, 2020 berjudul implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Covid 19 di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara menyatakan bahwa implementasi SIMDA Keuangan di lingkungan pemerintah daerah Kota Tomohon merupakan sebuah terobosan guna membuat memberikan Pelaporan pemerintah kepada pusat. penelitian I Kadek Indra Utama, 2020 berjudul Pengaruh Penerapan SAP dan penerapan SIPKD terhadap Kualitas Laporan keuangan di Pemerintah Kota Denpasar menyatakan bahwa Penerapan memiliki signifikan kualitas keuangan Kota Denpasar. Sedangkan Penerapan SIPD tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, ini dikarenakan teknologi belum dimanfaatkan secara optimal, kurangnya OPD yang memiliki tenaga operator SIPD yang mampu dan handal dalam mengaplikasikan sistem itu sendiri. penelitian Didi Achjari, 2020 berjudul Peran Akuntabilitas Keuangan Sebagai Pemediasi Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Hasil bahwa keuangan memediasi penuh implementasi terhadap organisasi. penelitian membuktikan tidak terdapat efek moderasi pada pengaruh implementasi SIPD terhadap akuntabilitas keuangan. menunjukkan akuntabilitas mampu secara pengaruh SIPD kinerja Hasil juga penelitian Cintya Infantrina Riady berjudul Analisis kesiapan penggunaan aplikasi berbasis online dalam laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas di Kota Tasik Malaya. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) pada Dinas Kota Tasik Malaya menyatakan bahwa Sistem informasi pembangunan daerah ini sangat bagus karena

dapat memuat seluruh perencanaan pembangunan yang ada di setiap daerah di Indonesia, memfasilitasi dan mendorong terwujudnya sistem data dan informasi bagi pengambilan keputusan dan kebijakan perencanaan pembangunan baik di daerah maupun pusat, meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk membangun pola kerja sama berbasis data dan informasi. penelitian Citta Nadya, 2020 berjudul Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) daerah Kota Manado menyatakan bahwa Sistem informasi pembangunan daerah ini sangat bagus karena dapat memuat seluruh perencanaan pembangunan yang ada di setiap daerah di Indonesia memfasilitasi dan mendorong terwujudnya sistem data dan informasi bagi pengambilan keputusan dan kebijakan perencanaan pembangunan baik di daerah maupun pusat, meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk membangun pola kerja sama berbasis data dan informasi.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Merujuk hasil penelitian terdahulu sebagaimana tercantum pada tabel di atas dapat ditemukan keunggulan yang sekaligus menjadi pembeda pada penelitian skripsi ini yaitu :

Sistem informasi yang diteliti mempunyai keunggulan dari sistem sistem yang sudah ada sebelumnya Penelitian ini meneliti terkait dengan penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang termasuk sistem informasi yang baru diterapkan di Indonesia. Sistem yang terbilang masih baru dalam penerapannya sehingga diharapkan melalui penelitian ini dapat mengetahui apa saja faktor penghambat serta penanganan faktor penghambat tersebut

#### **1.5. Tujuan.**

Penyusunan Laporan Akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Banjarmasin, faktor penghambat dalam penggunaan SIPD, serta upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin.

## **II. METODE**

Untuk memecahkan suatu masalah dilakukan suatu penelitian dengan melaksanakan penyelidikan yang hati-hati, teratur dan berkelanjutan, sedangkan untuk mengetahui langkah penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode penelitian. Metode sangat erat hubungannya dengan sistem dan menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Metode merupakan cara yang nantinya akan ditempu guna lebih mendalami obyek studi itu. Suatu metode dipilih dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan obyek studi. (Hardani, 2020:13). Menurut (Sugiyono, 2016:13) menjelaskan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara untuk mencari, memperoleh, mengumpulkan dan mencatat data, baik berupa data primer ataupun data sekunder yang digunakan sebagai bahan dalam menyusun suatu karya ilmiah yang selanjutnya menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan tercapai suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data induktif yang berarti mengambil kesimpulan dari hal yang khusus menjadi hal yang bersifat umum.

### 1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah jenis wawancara semi terstruktur. merupakan wawancara yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan secara bebas akan tetapi masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sebelumnya telah dibuat. Cara ini digunakan penulis guna memperoleh informasi dan data yang diperlukan mengenai pengelolaan persandian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

### 2. Observasi

Observasi adalah kegiatan manusia yang melibatkan penggunaan panca indera, dengan mata berfungsi sebagai perangkat utama dalam sistem, di samping indera lain seperti mulut, kulit, penciuman, dan pendengaran. Pendekatan ini mengharuskan penulis untuk mengamati topik penelitian secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan alat bantu berupa petunjuk penelitian berupa lembar observasi atau lainnya.

Pada penelitian ini Observasi dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan cara menulis segala Informasi yang didapatkan dan diperlukan untuk penulisan penelitian.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi ini, menurut para ahli, merupakan sarana pengumpulan data yang tidak langsung ditentukan pada subjek penelitian. Dokumen dapat dalam berbagai bentuk, termasuk jurnal, surat pribadi, catatan dari berbagai situasi profesional, dan materi lainnya yang telah dilengkapi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan DI Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

#### 1. Komunikasi

Secara umum Edwards III dalam teori Implementasi membahas tiga hal penting yang terdapat dalam proses komunikasi yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Komunikasi adalah suatu proses dua arah berupa penyampaian informasi oleh informan kepada penerima. Komunikasi diperlukan dalam menjalankan kebijakan tepatnya mengenai pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sehingga akuntabilitas Keuangan dapat tercapai. Komunikasi membutuhkan sarana dan prasarana dengan memanfaatkan fasilitas teknologi yang ada. Komunikasi juga harus dijalankan secara dua arah bukan satu arah agar tidak terjadinya kesalahan penyampaian atau miskomunikasi. sebuah komunikasi antara pimpinan dan bawahan serta antar sesama pegawai dalam sebuah OPD sangatlah penting, karena komunikasi mempengaruhi pelaksanaan sebuah kebijakan yang telah ditetapkan bersama, jika komunikasi tidak berjalan lancar maka akan mempengaruhi proses pengelolaan informasi keuangan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Transmisi Edward III menyatakan bahwa faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik menyebabkan implementasi kebijakan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi lebih Optimal. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi ditinjau dari proses

transmisi atau penyaluran komunikasi di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin belum sepenuhnya berjalan secara baik sebab masih terjadinya kesalah pahaman akan informasi atau perintah yang diberikan dalam hal pegawai tidak merespon dengan baik sehingga proses komunikasi antar pimpinan dan pegawai mengalami miskomunikasi. Terjadinya miskomunikasi tersebut berdampak pada pencapaian hasil kerja yang kurang maksimal dalam pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPD) di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

Kejelasan, Sebuah komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan dalam hal ini pegawai haruslah jelas dan tidak membingungkan agar implementasi akan suatu kebijakan yang telah ditetapkan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan bahwaterkadang informasi yang disampaikan atasan lewat perintah kerjatidak jelas hal ini berarti bahwa *informan* dalam hal ini adalah pimpinan memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan kejelasan perintah yang diberikan. Ketika perintah yang diberikan jelas maka akan memudahkan pegawai untuk menjalankan perintah tersebut, sebaliknya ketika perintah tersebut tidak jelas sudah tentu akan membuat pegawai kebingungan dalam bekerja.

Konsistensi merupakan salah satu aspek yang penting dalam komunikasi. Apabila kebijakan yang diambil oleh pimpinan tidak konsisten atau berubah-ubah membuat suatu program yang akan dilaksanakan tidak dapat berjalan dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa terjadinya ketidak-konsistensi lewat kebijakan yang dikeluarkan akan berpengaruh terhadap ketidakefektifan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebab Jika implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ingin menjamin akuntabilitas maka perintah-perintah pelaksana harus konsisten dan jelas walaupun perintah-perintah yang disampaikan pada seluruh OPD selaku pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi apabila kebijakan tersebut tidak konsisten maka kebijakan tersebut tidak akan memudahkan seluruh OPD menjalankan tugasnya dengan baik.

## **2. Sumber Daya**

Sumber Daya merupakan faktor penting dalam melakukan dalam melaksanakan suatu kebijakan. Oleh sebab itu, sumber-sumber ini harus dikelola secara baik untuk dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi pada organisasi pemerintahan sehingga menciptakan pegawai yang berkompeten dalam menjalankan pekerjaan.

- 1. Staf**
- 2. Informasi**
- 3. Wewenang**
- 4. Fasilitas**

## **3. Disposisi**

Kecenderungan dari Implementasi merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Menurut Edward menyatakan bahwa kebijakan akan dilaksanakan secara efektif jika mendapat dukungan dari pelaksana namun jika kebijakan tersebut bertentangan dengan pandangan atau kepentingan pelaksana

maka para pelaksana tidak melaksanakan kebijakan tersebut. Jika para pelaksana mendukung akan suatu kebijakan maka pastinya mereka melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan bersama. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa disposisi merupakan faktor penting dan mempunyai konsekuensi bagi pelaksanaan kebijakan agar berjalan dengan baik. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif dan mendukung terhadap implementasi kebijakan tersebut maka kebijakan tersebut akan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan walaupun di Badan Keuangan Daerah masih dilakukan penyesuaian disebabkan karena baru dilakukannya mutasi pegawai pada seluruh OPD di Kota Banjarmasin. Namun selama ini yang saya lihat kecenderungan yang ada tidak membuat pegawai bersifat negatif, dengan demikian kebijakan tersebut tidak menimbulkan kendala dan berjalan sesuai tujuan.

#### **4. Struktur Organisasi**

Edward III menyatakan bahwa Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi tidak hanya berada pada struktur pemerintahan tetapi juga berada pada struktur swasta, bahkan institusi-institusi pendidikan dan kadang kala suatu sistem birokrasi diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi yakni Ahmad Syafi'e ST, MM pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 bertempat di Badan Keuangan Daerah Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan seorang kepala daerah mempunyai pengaruh besar dalam sebuah organisasi terutama dalam penempatan kedudukan atau jabatan kepada pegawai yang berada di seluruh OPD yang berada di Pemerintah Kota Banjarmasin terutama di Badan Keuangan Daerah yang dimana kebijakan dalam memberikan sebuah jabatan kepada seseorang masih melihat dari segi kekeluargaan atau kolega dan juga tim sukses saat pemilihan kepala daerah yang tidak sesuai dengan pengetahuan atau pengalaman kerja yang dimiliki, sehingga hal inilah yang dapat memberikan pengaruh yang kurang baik atau kurang efektifnya terhadap pengelolaan keuangan yang ada di Badan Keuangan Daerah.

#### **3.2. Faktor Penghambat Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur**

Tujuan dari aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah memudahkan pekerjaan pemerintah daerah, memperkecil kesalahan saat memasukan data keamanan terhadap penyimpanan data, membuat laporan sesuai dengan format yang dibutuhkan dan mengurangi pekerjaan yang dilakukan secara manual. Bisa dikatakan dalam era digitalisasi ini, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sangat dibutuhkan demi terwujudnya informasi keuangan yang cepat, akurat, efisien, efektif, akuntabel dan transparan. Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dipakai oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin OPD lainnya seluruhnya masih dibawah pengawasan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Namun meski demikian pun pengawasan dan bimbingan dari Kemendagri masih kurang sebab pemahaman pegawai yang mengelola keuangan

dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) masih kurang berkompoten. Hasil wawancara dengan Kabid Akuntansi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yakni Hidayah Fitriani, SE pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2022 bertempat di kantor Badan Keuangan Daerah, dari hasil wawancara tersebut penulis mendapatkan hal-hal penting yang di sampaikan yaitu : Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang kamipakai saat ini masih harus perlu diperhatikan lagi terkhusus kepada pegawai yang mengelola karena belum terlalu memahami kadang ada yang salah dalam mencetak hasil dokumen yang dikelola ataupun lainnya untuk itu pemahaman lebih lanjut harus dilkakukan demi peningkatan sumber daya aparatur di BKD ini, lebih baiknya lagi jika ada jangka waktu yang ditentukan untuk memantapkan para aparatur ini dengan adanya bimbingan teknis atau pelatihan berkala sehingga dalam mengelola keuangan dengan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini tidak terhambat dan terciptanya suatu pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah di atas maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya aparatur di Badan Keuangan Daerah masih belum sepenuhnya memahami aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), untuk itu hal ini harus menjadi perhatian agar melakukan bimbingan teknis dengan memperhatikan jangka waktu tertentu supaya sumber daya aparatur dalam hal ini pegawai yang menjalankan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dan memiliki hasil yang berbeda pada implementasinya. Diantaranya sebagai berikut

a. Kesimpulan Penelitian yang peneliti laksanakan di BPKAD Kota Banjarmasin bahwa aplikasi SIPD masih belum efektif dan terlaksana dengan baik khususnya pada penatausahaan keuangan karena masih belum jelasnya informasi pelaksanaan serta belum konsistennya penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada bidang penatausahaan. Dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Nadya Balqis (2021) berjudul Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyatakan bahwa Dari segi waktu SIPD yang diterapkan oleh Dinas Transmigrasi serta Tenaga Kerja (DISTRANAKER) menciptakan informasi data yang lebih baik dan cepat. Bahwa penerapan SIPD sudah efektif.

b. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan SIPD bidang penatausahaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hilir belum terlaksana dengan baik karena belum terpenuhinya indikator kejelasan serta konsistensi pada implementasinya. hal ini memiliki kesamaan dengan hasil penelitian terdahulu terkait Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, menyatakan masih banyak perbaikan dan pada Sistem pemerintahan daerah di Kota Medan sehingga banyak pekerjaan dan pada proses penginputan data lainnya sehingga mengalami

keterlambatan pengiriman. Serta hasil penelitian terdahulu oleh Muhammad Ikhwan (2021) berjudul Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Banjarmasin menyatakan bahwa Di tengah Covid-19 saat ini pun penggunaan SIPKD di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin belum berjalan sesuai dengan Teori Edwards III.

#### **4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Penulis menemukan bahwa meskipun pengelolaan persandian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan SOP, akan tetapi tetap ada peluang terjadinya gangguan. Penulis menemukan bahwa saat ini marak terjadi serangan dengan isi konten iklan judi online yang menyusupi website pemerintahan meskipun begitu serangan yang terjadi dapat diatasi dengan cepat dan tepat.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa terhadap data dan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di lingkungan pemerintah daerah Kota Banjarmasin merupakan sebuah terobosan guna membuat dan memberikan pelaporan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin belum berjalan sesuai dengan Teori Edwards III (2008), dengan indikatornya yaitu: Komunikasi, Proses komunikasi telah dijalankan BPKAD Kota Banjarmasin. Hal ini dapat dilihat dari intensitas penyebaran informasi kepada seluruh SKPD yang ada di Kota Banjarmasin. BPKAD juga telah menyusun Surat Keputusan Walikota yang memuat kejelasan pelaksanaan kegiatan. Pada Surat Keputusan yang dimaksud juga terdapat konsistensi tentang uraian tugas yang harus dilakukan. Sumber Daya Pimpinan harus memiliki perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk analisis beban kerja, dan analisis kompetensi, SDM yang diperlukan sebagai dasar perencanaan pemenuhan kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM, khususnya SDM pengelola keuangan dan pengelolaan SIPD. Sumber daya penunjang implementasi SIPD saat ini masih belum memadai, oleh karena itu di BPKAD perlu mengusulkan kembali tambahan staf di bidang akuntansi untuk meminimalisir ketidakandalan penyajian laporan keuangan dalam SIPD. Disposisi Kecenderungan pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dilihat dari indikator yaitu pengangkatan birokrat dan insentif, pegawai di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin penempatannya belum sesuai dengan keahliannya masing-masing dan biaya insentif telah diberikan kepada pegawai yang bekerja dengan baik. Struktur Birokrasi Dinilai dari dua aspek yaitu ketersediaan SOP Internal terkait koordinasi antar seksi dan pola hubungan kerja di dalam tubuh BPKAD. Terkait dengan hal pola hubungan kerja, BPKAD Kota Banjarmasin memiliki pola hubungan kerja yang baik dan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Hal ini menjadi unik ketika dilihat bahwa BPKAD tidak memiliki SOP Internal yang berisi proses penyelenggaraan administrasi tentang tata cara melakukan pekerjaan, peraturan yang berisi koordinasi internal dari BPKAD sebagai aktor yang berperan dalam implementasi SIPD Penerapan SIPD pada penganggaran di Kota Banjarmasin telah berjalan dengan cukup baik dan dinilai sudah efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kualitas terhadap pelaporan keuangan daerah, hal ini disebabkan karena cara kerja sistem ini akan mengunci dokumen anggaran yang sudah final sehingga pelaksanaan realisasi anggaran dapat berjalan dengan tertib dan mengurangi kemungkinan terjadinya

penyimpangan terhadap penggunaan anggaran sehingga informasi terkait dengan keuangan yang di sajikan dalam sistem ini transparan dan akuntabel yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan daerah. Namun dari segi sumber daya manusia tidak bisa di pungkiri terdapat kekurangan, di satu sisi Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin melakukan upaya yang di harapkan dapat meminimalisir kekurangan tersebut. Peningkatan atau upgrade pada sistem ini masih sangat di perlukan agar penganggaran dapat dilakukan dengan lebih baik Berdasarkan analisis tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor Penghambat yang mempengaruhi Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dalam mengelola keuangan daerah. Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan

13

Keuangan Daerah Kota Banjarmasin sebagai berikut: Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur. Keterlambatan dalam mensosialisasikan aplikasi dan regulasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang terbaru. Sarana dan prasarana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang belum memadai. Berdasarkan analisis tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa Upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah dalam menghadapi hambatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dalam mengelola keuangan daerah. Adapun Upaya dari Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin sebagai berikut: Melakukan Pelatihan berkala bagi Pegawai mengenai Pengoperasian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan menambah Pegawai di Bakeuda Banjarmasin. Mensosialisasikan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Regulasi yang terbaru dengan tepat waktu. Melakukan perbaikan, pemeliharaan dan pembaharuan sarana dan prasarana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah(SIPD).

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Bertolak dari beberapa kesimpulan yang penulis kemukakan maka saran dari penulis untuk meningkatkan akuntabilitas Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: Mengadakan Pelatihan Berkala Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bagi admin, operator baik di pusat maupun didaerah dan modul Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang bisa dipelajari oleh operator Melakukan perbaikan pada fasilitas sistem yang rusak, serta memasang antivirus untuk menjaga keamanan data. Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Banjarmasin diharapkan memiliki Standar Operasional Standar (SOP) dalam pelaksanaannya seperti dalam pengamanan, pengendalian, dan pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Diharapkan agar Badan Keuangan Daerah lebih update dan informatif di situs website mengenai profil Badan

Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, dan juga menampilkan informasi-informasi keuangan yang diperuntukkan kepada masyarakat.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian..

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Hardani dkk. 2020. *Metode penelitian Kualitatif & kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Firdausy, Carunia Mulya. 2017. *Optimalisasi kebijakan Penerimaan daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hartono, Bambang. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Latif, Arsan, dkk. 2019 *Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- Moenek, Reydonnizar dan Dadang Suwanda, 2019, *Good Government pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: Rosda.
- Suwanda, Dadang. 2019. *Sistem Akuntansi Akrual Pemerintahan Daerah Berpedoman SAP Berbasis Akrual*. Jakarta: Gramedia.
- Tambunan, Toman Sony. 2016. *Glosarium Istilah Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.